


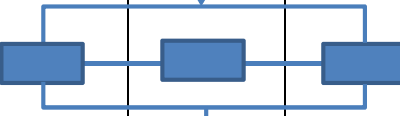










 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-021-079.Set.KumSidhal
	Tanggal Pembuatan	Senin, 17 Juli 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan  Sidiq Mustofa, S.E., M.M. NRP. 9582/P
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Pemberian Advokasi Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara untuk Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan		

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016 tentang JDIH Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan terkait proses pemberian bantuan hukum 2. Mempunyai pengalaman sebagai <i>problem solver</i> 3. Menguasai <i>legal drafting</i> 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office 5. Memiliki kemampuan presentasi 6. Memiliki kecermatan dan ketelitian
Keterkaitan : 1. SOP Makro Pemberian Advokasi Hukum	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pemberian bantuan hukum bagi para pejabat/pegawai di Kemenko Polhukam	Pencatatan dan pendataan : Daftar inventarisasi penanganan bantuan hukum

SOP Mikro Pemberian Advokasi Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara untuk Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kabag Hukum	Kasubbag PPH dan PAH	Pelaksana (JFT/JP)	Pemohon	Jaksa Pengacara Negara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kasubbag PPH dan PAH untuk memberikan advokasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pemohon						surat/naskah dinas permintaan advokasi hukum	15 Menit	disposisi	
2	Meneliti dan mempelajari bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum serta berkoordinasi dengan pemohon serta melakukan analisis apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan						disposisi	1 Hari	Bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum + disposisi	
3	Melakukan pertemuan dengan pemohon untuk membahas langkah-langkah untuk mendapat advokasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN)						Bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum + disposisi	120 Menit	Kesepakatan	
4	Menyusun surat permohonan kepada Kejaksaan untuk mendapatkan advokasi hukum dari JPN						Kesepakatan	30 Menit	Surat permohonan kepada Kejaksaan untuk mendapatkan advokasi	
5	Menerima surat permohonan advokasi hukum, membuat telaahan awal apakah dapat dilakukan upaya advokasi hukum, dan menyusun surat jawaban permohonan yang mencantumkan nama-nama JPN Penerima Kuasa						Surat permohonan kepada Kejaksaan untuk mendapatkan advokasi	tentatif	Surat jawaban permohonan	
6	Menyusun konsep Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan dasar surat jawaban permohonan yang mencantumkan nama-nama JPN Penerima Kuasa, kemudian menyampaikannya kepada Kasubbag PPH dan PAH						Surat jawaban permohonan	60 Menit	Konsep SKK	
7	Memeriksa konsep SKK dengan dasar surat jawaban permohonan yang mencantumkan nama-nama JPN Penerima Kuasa, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hukum						Konsep SKK	15 Menit	Konsep SKK telah diperiksa Kasubbag	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kabag Hukum	Kasubbag PPH dan PAH	Pelaksana (JFT/JP)	Pemohon	Jaksa Pengacara Negara	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Memeriksa konsep SKK dengan dasar surat jawaban permohonan yang mencantumkan nama-nama JPN Penerima Kuasa, dan menidndaklanjuti penandatanganan oleh pemohon, kemudian menugaskan Kasubbag PPH dan PAH untuk melakukan pemantauan						Konsep SKK telah diperiksa Kasubbag	10 Menit	Konsep SKK telah diperiksa Kabag + disposisi	
9	Melakukan pemantauan proses hukum dan menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep laporan perkembangan proses hukumnya						Konsep SKK telah diperiksa Kabag + disposisi	tentatif	Pemantauan Proses Hukum + disposisi	
10	Menyusun konsep laporan perkembangan proses hukum, kemudian menyampaikannya kepada Kasubbag PPH dan PAH						Pemantauan Proses Hukum + disposisi	1 Hari	konsep laporan perkembangan proses hukum	
11	Memeriksa konsep laporan perkembangan proses hukum, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hukum						konsep laporan perkembangan proses hukum	60 Menit	konsep laporan perkembangan proses hukum telah diperiksa Kasubbag	
12	Menerima bahan dan data pemberian pendampingan hukum beserta laporannya untuk dijadikan data dukung terkait proses pemberian advokasi						konsep laporan perkembangan proses hukum telah diperiksa Kasubbag	15 Menit	dokumen laporan perkembangan advokasi hukum	